



## KENAIKAN IURAN BPJS KESEHATAN

# Yogya Siapkan Perubahan Anggaran

**UMBULHARJO (MERAPI)** - Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan belum diantisipasi dengan memasukkan tambahan anggaran dalam rencana APBD 2020 Kota Yogyakarta. Pemkot Yogyakarta masih menunggu keputusan resmi terkait kepastian perubahan iuran BPJS kesehatan itu.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Yogyakarta Kadri Renggono mengatakan, sesuai aturan tata kala, Pemkot Yogyakarta harus mengirimkan RAPBD 2020 ke DPRD Kota Yogyakarta pada pertengahan September. Sedangkan untuk memasukkan tambahan maupun perubahan anggaran harus ada landasan yang dimiliki pemkot. "Tapi sampai kini belum ada kepastian resmi terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka kami belum memasukkan perubahan itu ke dalam perencanaan anggaran," kata Kadri, Minggu (22/9).

Ia menyampaikan jika keputusan resmi tentang kenaikan iuran BPJS Kesehatan terbit setelah APBD 2020 ditetapkan, Pemkot Yogyakarta akan berupaya memenuhinya. Pertimbangannya karena kesehatan adalah pelayanan dasar ke masyarakat yang harus dipenuhi.

"Tentu pemerintah pusat akan memberikan

perintah kepada pemda untuk mengalokasikan anggaran untuk BPJS Kesehatan. Kalau ada perintah itu kami lakukan," paparnya.

Pemkot Yogyakarta selama ini menanggung anggaran untuk kebutuhan pembayaran iuran BPJS bagi warga miskin penerima bantuan iur (PBI) atau melalui program PDPD yaitu penduduk yang dibayarkan pemerintah daerah. Selain itu bagi tenaga bantuan di lingkungan Pemkot Yogyakarta. Ketiga kepesertaan itu menggunakan layanan BPJS Kesehatan kelas 3.

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi menyatakan Pemkot Yogyakarta dalam menyusun RAPBD 2020 masih mengacu pada nilai iuran BPJS kesehatan yang berlaku saat ini. Namun dia menegaskan Pemkot Yogyakarta siap mengalokasikan tambahan di APBD Perubahan 2020 jika alokasi untuk jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah di murni menipis.

"Dari informasi yang beredar yang naik iurannya untuk kepesertaan kelas satu dan dua. Sedangkan kelas tiga tidak naik. Tapi juga perlu diantisipasi kemungkinan peserta mandiri kelas satu dan dua beralih ke kelas tiga. Karena saat iuran tidak naik, masih banyak yang menunggak, apalagi jika nanti iuran dinaikkan," tandas Heroe.

(Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Asisten Perekonomian dan Pemba	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 Januari 2025  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005